

BAB III

PEMBAHASAN

1.1. Tinjauan Umum Perusahaan

1.1.1. Sejarah Perkembangan Perusahaan

Membangun komitmen kedinasan melalui pengungkapan sejarah dipandang langkah tepat karena sejarah bisa menjadi modal dalam mengilhami serta inspirasi kedepan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat telah menepuh suatu perjalanan panjang tanpa terhindar dari pasang surut, hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan ketika adanya wasana penggabungan Dinas Pendapatan dan Biro Keuangan, pertimbangan sejarah panjang bahwa tidak mudah membangun Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki asal muasal dari Biro Keuangan Daerah. Ini bagian dari satu pertimbangan selain pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi sejarah ini telah membuktikan bahwa pengalaman itu adalah guru dalam kehidupan kita. Perkembangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, diawali dengan terbentuknya Djawatan Perpajakan dan Pendapatan Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi DT I Jawa Barat. Dengan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor: 219/Po/V/O.M/SK/1971 tanggal 25 September 1971 dan tanggal itu pula yang dijadikan tonggak sejarah hari jadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.





Gambar II.1.

Gambar Dispenda Jawa Barat 1971



Sebelum itu dengan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 60/PO/V/OM/SK/71 sudah dibentuk suatu Biro Pendapatan dan Perpajakan, akan tetapi unit kerja ini hanya merupakan embrio semata, karena unit kerja tersebut tidak berdiri sendiri dan masih diposisikan sebagai sub ordinat dari administratur bidang keuangan. Bidang pendapatan dan keuangan adalah satu rumpun, ketika proses mekanisme berkembang, pendapatan berkembang, keuangan berkembang, maka bidang ini dipecah menjadi disiplin fungsi sendiri.

Setelah berubah nama menjadi Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Djawa Barat dilakukan penyesuaian kelembagaan dengan Perda Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 7/DP.040/PD/78 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat.

Namun demikian sumber daya dinas yang dimiliki pada saat itu masih sangat terbatas, baik pegawai, sarana maupun beban target pendapatan daerah. Bahkan pada

saat itu telah diupayakan penggalan sumber pendapatan baru berupa Pungutan Bea Balik Nama Tanah (PBNT) yang kemudian dilakukan pembekuan pemungutannya. Selanjutnya dilakukan penyesuaian kelembagaan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat



Gambar 1.2.
Gambar Dispenda Jawa Barat 1997

Perubahan ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah terjadi seiring dengan ditetapkannya UU Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pada saat itu kembali Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat kehilangan jenis pendapatan yang dikelola karena berdasarkan UU tersebut terdapat jenis pungutan retribusi pengambilan air dan retribusi bahan galian golongan c ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota. Seiring dengan itu, terjadi krisis moneter di Indonesia yang berdampak terhadap penurunan pendapatan asli daerah secara signifikan.

Kemajuan dalam Inovasi Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan banyak diapresiasi oleh berbagai pihak, bahkan Inovasi E-Samsat Jabar dijadikan

sebagai Pilot Project Pelayanan Publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk direplikasi ke 17 Provinsi lainnya di Indonesia.

Setelah selama 45 tahun berkiprah di Provinsi Jawa Barat, terhitung tanggal 3 Januari 2017 Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat. Pergantian nama dari Dispenda ke Bapenda diresmikan secara langsung oleh Kepala Bapenda (Kaban) Provinsi Jawa Barat, Dadang Suharto di Aula Besar Gedung Bapenda Jawa Barat. Sejak tahun 1984 sampai dengan saat ini Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 528 Bandung yang sebelumnya berada di Jalan Ir. H. Juanda No. 37 Bandung

Visi

“Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah dan Akuntabel.”

Misi

“Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah Yang Makin Optimal.”

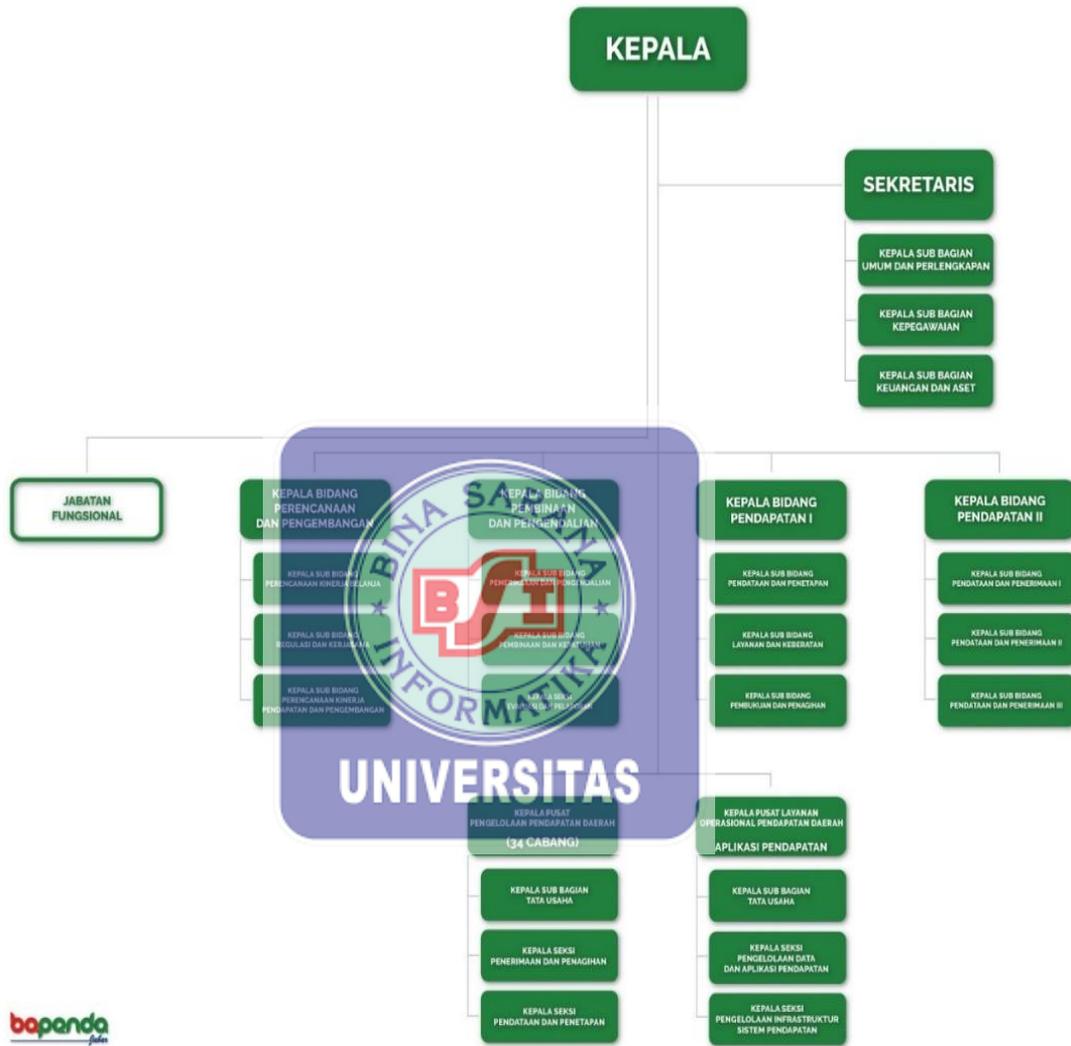
“Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat yang berdaya saing.”



1.1.2. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok

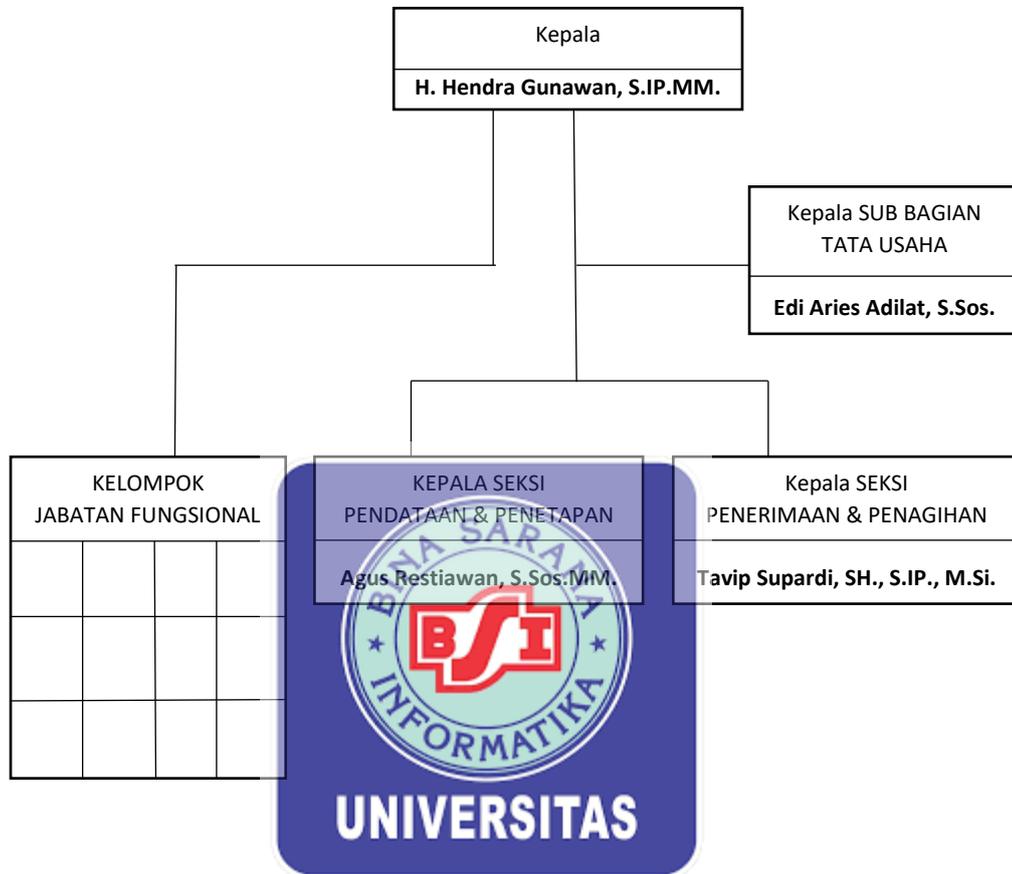
1. Struktur Organisasi

a. Stuktur Organisasi Bapenda Jawa Barat



Gambar II.3.
Struktur Organisasi Bapenda Jawa Barat

**b. Struktur Organisasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat Wilayah Kota Depok I (Samsat Depok I)**



Gambar II.4.
**Struktur Organisasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat Wilayah Kota Depok I**

2. Uraian Tugas

Program Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mencakup dua aspek yakni Pendapatan dan Pelayanan :

a. Kinerja Pendapatan

1) Pelaksanaan Pungutan

a) Intensifikasi

Tugas Intensifikasi meliputi: (1) Penyempurnaan Landasan Hukum Pungutan, (2) Penyesuaian Struktur Tarif Pajak, (3) Penyempurnaan Database Potensi Pendapatan Daerah, (4) Sosialisasi Kebijakan Bidang Pendapatan Daerah Pencairan Tunggal, (5) Membuat Database dan Pemetaan Data (Road Map) Potensi Pendapatan Daerah.

b) Ekstensifikasi

Tugas Ekstensifikasi meliputi: (1) Penggalan WP / WR Baru, (2) Perluasan Objek Pajak Baru, (3) Antisipasi Pungutan Pajak Baru.

c) Revitalisasi BUMD untuk Peningkatan Kontribusi PAD.

d) Optimalisasi Pemberdayaan Asset yang Diarahkan Pada Peningkatan PAD.

2) Administrasi Pemungutan

a) Penyempurnaan atas Regulasi Administrasi Pungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

b) Penyusunan Software Sistem Akuntansi dan Pelaporan di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

c) Rekonsiliasi secara Periodik Antara Dinas Pendapatan, Biro Keuangan, Kas Daerah dan Kab / Kota.



d) Melakukan Pembinaan Teknis Pungutan Kepada SKPD Penghasil dan Kab / Kota.

3) Koordinasi

- a) Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat (Depdagri , Dep. Keuangan , Dep.Energi , dan DPR RI , dll).
- b) Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Provinsi Lain.
- c) Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten / Kota.
- d) Melakukan Koordinasi Dengan Polri dan PT. Jasa Raharja.
- e) Melakukan Koordinasi dengan SKPD Terkait Kab / Kota.

4) Anggaran

- a) Penerapan Prinsip Anggaran Kinerja (Output , Input , Income , Benefit dan Impact).
- b) Perencanaan Anggaran Dianalisis Pada Standar Analisis Biaya (SAB).
- c) Perencanaan Anggaran Secara Efektif Efisien , Dan Akuntabel Tertib. Administrasi Anggaran
- d) Penerapan Pelaksanaan Anggaran Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).



5) Pembinaan

- a) Mengoptimalkan Sistem Pengawasan Melekat (Waskat).
- b) Pembinaan Pelaksanaan Pungutan Secara Periodik.
- c) Pembinaan Disiplin Kerja.
- d) Pembinaan Etika Dan Moral PNS.
- e) Pembinaan Teknis Operasional Kepada SKPD Penghasil.
- f) Pembinaan Teknis Operasional Kepada Dipenda Kabupaten / Kota.

b. Kinerja Pelayanan

1) Organisasi Dan Tata Kerja

- a) Penataan Organisasi dan Uraian Tugas.
- b) Perumusan Tata Kerja Dan Mekanisme Kerja.
- c) Penyusunan SOP.
- d) Penyusunan SPM.
- e) Perumusan Typologi UPPD.

2) Sumber Daya Aparatur

Mewujudkan Pegawai yang Profesional dan Bermoral Dilakukan :

- a) Melaksanakan “Capacity Building” Di Berbagai Bidang Pendapatan.
- b) Tour Of Duty & Tour Of Area.
- c) Mengembangkan Sistem Karir (Carrier Planning).
- d) Menumbuhkembangkan Etos Kerja , Budaya Kerja , Dan Kebanggaan Exprit de Corp.
- e) Menerapkan Prinsip Reward and Punishment.
- f) Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.



3) Sarana dan Fasilitas Pelayanan

- a) Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkantoran.
- b) Pemenuhan Fasilitas Pelayanan (Lahan Parkir , Ruang Pelayanan , Ruang Arsip , dll).
- c) Pembentukan kantor Bersama / Samsat Pembantu.
- d) Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Berbasis IT.
- e) Pelaksanaan Online System Pajak Se Jawa Barat.

- 4) Pelayanan Khusus
 - a) Standar ISO 9001.
 - b) Pelayanan Drive Thru.
 - c) Pelayanan Gerai Samsat / Samsat Outlet.
 - d) Layanan SMS.
 - e) Samsat Mobile / Samsat Keliling.
 - f) Perintisan Banking System.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kedudukan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas

Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan atas azas otonomi dan tugas pembantuan.

c. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis Pendapatan.
- 2) Penyelenggaraan Pendapatan dan Pelayanan Umum, Meliputi Kesektariatan, Perencanaan dan Pengembangan, Pajak, Non Pajak, Pengendalian Dan Pembinaan Serta CPDP.
- 3) Penyelenggaraan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pendapatan Daerah Dan Pelayanan Umum.
- 4) Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas-Tugas Pendapatan Secara Internal Meliputi Kesektariatan, Perencanaan dan Pengembangan, Pajak, Non Pajak, Pengendalian dan Pembinaan, CPDP, Pembinaan Teknis Fungsional, Pendapatan Daerah dan Pelayanan Umum.



- 5) Penyelenggaraan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.1.3. Kegiatan usaha

Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan daerah meliputi suatu instansi dibidang pengelolaan pendapatan daerah dibawah naungan bapenda Jawa Barat. Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah bekerja sama dengan. Polda Jabar, Polda Metro dan PT. (Persero) Jasa Raharja. Pajak-pajak yang

1.2. Hasil Penelitian

1.2.1. Data Penelitian

Pada Penelitian yang penulis telah lakukan pada kantor pusat pengelolaan pendapatan daerah provinsi Jawa Barat Wilayah Kota Depok I memperoleh data target dan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2013-2017 sebagai berikut:



Tabel III.I

Tabel Data Bea Balik Nama kendaraan Bermotor Tahun 2013-2017

Tahun	Jenis Pendapatan Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	BBNKB I	256.901.046.000	265.552.650.000
	BBNKB II	3.711.000.000	8.574.731.000
2014	BBNKB I	276.537.021.000	280.175.294.000
	BBNKB II	9.253.700.000	8.996.476.300
2015	BBNKB I	233.218.000.000	252.028.226.000
	BBNKB II	10.165.400.000	7.875.102.300
2016	BBNKB I	273.083.000.000	297.617.200.000
	BBNKB II	7.387.000.000	7.489.628.700
2017	BBNKB I	257.549.000.000	267.285.702.000
	BBNKB II	10.568.000.000	11.462.811.000

Cara hitung persentase : $\frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Perencanaan}} \times 100\%$

BBNKB I:

$$2013 : \frac{265.552.650.000}{256.901.046.000} \times 100\% = 103\%$$

$$2014 : \frac{280.175.294.000}{276.537.021.000} \times 100\% = 101\%$$

$$2015 : \frac{252.028.226.000}{233.218.000.000} \times 100\% = 108\%$$

$$2016 : \frac{297.617.200.000}{273.083.000.000} \times 100\% = 109\%$$

$$2017 : \frac{267.285.702.000}{257.549.000.000} \times 100\% = 104\%$$

BBNKB II:

$$2013 : \frac{8.574.731.000}{3.711.000.000} \times 100\% = 213\%$$

$$2014 : \frac{8.996.476.300}{9.253.700.000} \times 100\% = 97\%$$

$$2015 : \frac{7.875.102.300}{10.165.400.000} \times 100\% = 77\%$$

$$2016 : \frac{7.489.628.700}{7.387.000.000} \times 100\% = 101\%$$

$$2017 : \frac{11.462.811.000}{11.462.811.000} \times 100\% = 108\%$$



Tabel III.II

Tabel Data persentase Bea Balik Nama kendaraan Bermotor I Tahun 2013-2017

Tahun	Jenis Pendapatan Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% (5:4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	BBNKB I	256.901.046.000	265.552.650.000	103
2014	BBNKB I	276.537.021.000	280.175.294.000	101
2015	BBNKB I	233.218.000.000	252.028.226.000	108
2016	BBNKB I	273.083.000.000	297.617.200.000	109
2017	BBNKB I	257.549.000.000	267.285.702.000	104

Tabel III.II

Tabel Data persentase Bea Balik Nama kendaraan Bermotor II Tahun 2013-2017

Tahun	Jenis Pendapatan Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% (5:4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	BBNKB II	3.741.000.000	8.574.731.000	231
2014	BBNKB II	9.253.700.000	8.996.476.300	97
2015	BBNKB II	10.165.400.000	7.875.102.300	77
2016	BBNKB II	7.387.000.000	7.489.628.700	101
2017	BBNKB II	11.462.811.000	11.462.811.000	108

1.2.2. Siklus Perkembangan Realisasi

Pada tahun 2013

BBNKB I dan BBNKB II mendapatkan realisasi penerimaan melampaui dari target yang telah ditetapkan oleh Bapenda Jabar yaitu BBNKB I sebesar 103% dan BBNKB II sebesar 231%

Pada tahun 2014

BBNKB I mendapat realisasi penerimaan melampaui dari target sebesar 101% namun pada tahun ini target yang ditetapkan lebih sedikit besar dari target tahun sebelumnya, sehingga persentase yang didapat tahun ini lebih sedikit kecil dari tahun 2013.

BBNKB II pada tahun ini target yang telah ditetapkan naik hampir 3 kali lipat dari tahun 2013, oleh karena itu realisasi penerimaan pada tahun ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan hanya mendapat persentase penerimaan sebesar 97%

Pada Tahun 2015

Pada tahun ini BBNKB I bapenda menetapkan target lebih menurun dari tahun 2014 namun realisasi penerimaannya pun tidak jauh berbeda dengan tahun 2014 dan pada tahun 2015 ini target dan penerimaan hanya mendapat persentase 108%

Pada tahun ini BBNKB II meskipun tahun lalu penerimaan tidak mencapai target namun pada tahun ini target perencanaannya pun di tambah menjadi Rp.10.165.400.000. sehingga realisasi penerimaannya sulit untuk mencapai target tersebut sehingga realisasi penerimaannya hanya sebesar Rp.7.875.102.300 dan memiliki persentase sebesar 77%



Pada tahun 2016

BBNKB I pada tahun ini bapenda jabar menetapkan target lebih besar dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 273.083.000.000 namun meskipun pada tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya, realisasi penerimaannya pun dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan memiliki persentase sebesar 109%

Target BBNKB II pada 2 tahun lalu cukup besar penaikannya sehingga tahun ini target yang ditetapkan oleh bapenda Jabar diturunkan menjadi Rp.7.387.000.000 sehingga realisasi penerimaannya pun dapat mencapai target dan memiliki persentase sebesar 101%

Pada tahun 2017

BBNKB I memiliki target perencanaan yang lebih kecil dari tahun 2016 yaitu hanya sebesar Rp.257.549.000.000 dan realisasi penerimaannya pun dapat mencapai target yang telah ditetapkan sehingga mendapat persentase 104%

BBNKB II memiliki target perencanaan yang lebih besar dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 10.568.000.000 dan realisasi penerimaannya pun dapat mencapai target yang telah ditetapkan sehingga mendapat persentase sebesar 108%

BBNKB I hampir setiap tahun pendapatannya mencapai target karena di daerah kota depok semakin hari semakin bertambah penduduknya dan semakin bertambah pula kebutuhan membeli kendaraan bermotor dan memiliki kendaraan baru lebih memperkecil kemungkinan cepat rusak. BBNKB II target dan penerimaannya jauh lebih kecil dari BBNKB I dikarenakan banyak wajib pajak yang membeli motor bekas tetapi tidak melakukan proses balik nama, sehingga wajib pajak atas nama yang tercantum di STNK apabila membeli kendaraan baru akan mengakibatkan progresif.



1.2.3. Syarat dan prosedur Bea Balik Nama Kendaraan bermotor

Dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk balik nama adalah sebagai berikut:

1. STNK asli dan fotokopi
2. KTP pemilik baru, asli, dan fotokopi
3. BPKB asli dan fotokopi
4. Kwitansi pembelian motor yang ditandatangani di atas meterai
5. KTP pemilik daerah yang akan dituju (asli dan fotokopi)

6. (Untuk badan hukum): Salinan akte pendirian + 1 lembar foto copy, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup & ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.

Untuk instansi pemerintah (termasuk BUMN & BUMD): surat tugas atau surat kuasa bermaterai cukup & ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

Tata Cara:

1. Kendaraan dihadirkan ke Samsat Induk tempat kendaraan terdaftar untuk melakukan Cek Fisik (gesek nomor rangka+mesin).
2. Menuju gudang arsip untuk mengambil berkas kendaraan.
3. Menuju Bagian Loker Mutasi (menyerahkan BPKB+KTP daerah yang dituju beserta fotokopi).
4. Menunggu Berkas keluar dengan waktu tertentu. (mendapat surat jalan sementara).
5. Kebagian Fiskal. Mendapatkan berkas mutasi keluar.
6. Setelah Berkas keluar, Laporan ke samsat daerah tujuan. (menyerahkan berkas-berkas yang diterima ke bagian mutasi).
7. Kendaraan dihadirkan ke Samsat Induk tujuan untuk melakukan Cek Fisik (gesek nomor rangka+mesin).
8. Kembali ke samsat daerah tujuan (menyerahkan berkas-berkas dan mendapat surat jalan sementara).
9. Menunggu STNK + Pelat Nomor.
10. Kembali ke samsat induk tujuan untuk mengambil STNK + Plat Nomor baru.



11. Menunggu BPKB yang di-update dengan waktu tertentu.
12. Mengambil BPKB yang telah di Update.

